

**IMPLEMENTASI PROGRAM PENYEDIAAN AIR MINUM DAN SANITASI
BERBASIS MASYARAKAT (PAMSIMAS) DI DESA BERINGIN JAYA KECAMATAN
BAEBUNTA SELATAN KABUPATEN LUWU UTARA**

Riska Firdaus

Ilmu Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Andi Djemma, Palopo
Email : riska269@gmail.com

Abstrak

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh masalah dimana mulai dari tidak berjalannya program PAMSIMAS di Desa Beringin Jaya Kecamatan Baebunta Selatan Kabupaten Luwu Utara padahal sudah ada bangunan disediakan, serta adanya kerusakan maupun ketidaklengkapan peralatan dalam bangunan Pamsimas tersebut, sehingga pelaksanaan program tersebut terkendala dan kurangnya keterlibatan langsung dari masyarakat di Desa Beringin Jaya serta kurangnya koordinasi pihak pengelola Pamsimas. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis Implementasi Program Penyediaan Air Minum dan Sanitasi Berbasis Masyarakat (Pamsimas) di Desa Beringin Jaya, Kecamatan Baebunta Selatan, Kabupaten Luwu Utara. Penelitian ini menggunakan tipe penelitian deskriptif kualitatif. Teknik pengumpulan data adalah wawancara, observasi dan juga berdasarkan data dari program Pamsimas di Desa Beringin Jaya. Hasil penelitian yang dilakukan dengan beberapa indikator yang dikemukakan oleh Grindle (1980) yaitu kepentingan yang dipengaruhi oleh kebijakan, jenis manfaat yang akan dihasilkan, derajat perubahan yang diinginkan, kedudukan pembuat kebijakan, (siapa) pelaksana program, dan sumber daya yang dihasilkan, menunjukkan bahwa Implementasi Program Penyediaan Air Minum dan Sanitasi Berbasis Masyarakat (Pamsimas) di Desa Beringin Jaya, Kecamatan Baebunta Selatan, Kabupaten Luwu Utara belum berjalan dengan baik dan dalam proses pelaksanaannya masih belum maksimal karena masyarakat masih mengeluhkan sistem program Pamsimas ini.

Kata Kunci : *Implementasi, Program Pamsimas*

PENDAHULUAN

Kebijakan menurut Thomas R. Dye (2011) adalah apapun yang dipilih oleh pemerintah untuk melakukan atau tidak melakukan (*public policy is whatever governments choose to do or not to do*). Sehingga kebijakan publik dibuat oleh badan pemerintah, bukan organisasi swasta. Dan kebijakan publik menyangkut pilihan yang harus dilakukan atau tidak dilakukan oleh badan pemerintah.

Anderson (2010) kebijakan publik ini mempunyai beberapa implikasi, yakni *pertama*, titik perhatian kita dalam membicarakan kebijakan publik berorientasi pada maksud atau tujuan dan bukan perilaku secara serampangan. Kebijakan publik secara luas dalam sistem politik modern bukan suatu yang terjadi begitu saja melainkan direncanakan oleh aktor-aktor yang terlibat di dalam sistem politik. *Kedua*, kebijakan merupakan arah atau pola tindakan yang dilakukan oleh pejabat-pejabat pemerintah dan bukan merupakan keputusan-keputusan yang tersendiri. Suatu kebijakan mencakup

tidak hanya keputusan untuk menetapkan undang-undang mengenai suatu hal, tetapi juga keputusan-keputusan beserta dengan pelaksanaannya. *Ketiga*, kebijakan adalah apa yang sebenarnya dilakukan oleh pemerintah dalam mengatur perdagangan, mengendalikan inflasi, atau mempromosikan perumahan rakyat dan bukan apa yang diinginkan oleh pemerintah. *Keempat*, kebijakan publik mungkin dalam bentuknya bersifat positif atau negatif. Secara positif, kebijakan mungkin mencakup bentuk tindakan pemerintah yang jelas untuk mempengaruhi suatu masalah tertentu. Secara negatif, kebijakan mungkin mencakup suatu keputusan oleh pejabat-pejabat pemerintah, tetapi tidak untuk mengambil tindakan dan tidak untuk melakukan sesuatu mengenai suatu persoalan yang memerlukan keterlibatan pemerintah.

Dengan kata lain, pemerintah dapat mengambil kebijakan untuk tidak melakukan campur tangan dalam bidang-bidang umum maupun khusus. Maka, kebijakan publik adalah kebijakan-kebijakan yang dibuat oleh pemerintah sebagai pembuat kebijakan untuk mencapai tujuan-tujuan tertentu di masyarakat

dimana dalam penyusunannya melalui berbagai tahapan.

Kebijakan publik merupakan suatu keputusan atau suatu pilihan keputusan untuk mengambil atau tidak mengambil keputusan dalam permasalahan yang ada di tengah masyarakat. Kebijakan publik mengatur baik secara langsung atau tidak langsung pengelolaan sumber daya alam, sumberdaya manusia, atau pengelolaan tatanan kenegaraan dan perekonomian untuk kepentingan publik atau kepentingan umum, yaitu masyarakat luas, segala lapisan penduduk dalam suatu negara.

Nugroho (2011) mengemukakan bahwa Kebijakan Publik adalah keputusan yang dibuat oleh negara, khususnya pemerintah, sebagai strategi untuk merealisasikan tujuan negara yang bersangkutan. Kebijakan publik adalah strategi untuk mengantar masyarakat pada masa awal, memasuki masyarakat pada masa awal, memasuki masyarakat pada masa transisi, untuk menuju pada masyarakat yang di cita-citakan.

Kebijakan publik dalam bentuk undang-undang atau peraturan daerah adalah jenis kebijakan publik yang memerlukan kebijakan publik penjelas atau yang sering diistilahkan sebagai peraturan pelaksanaan. Kebijakan publik yang bisa langsung operasional antara lain kepres, inpres, kepmen, keputusan kepala daerah, keputusan kepala donas. Jadi kebijakan publik dimulai dari program, ke proyek, dan kemudian ke dalam bentuk kegiatan.

Era Otonomi Daerah saat ini menuntut Pemerintah Daerah memberikan peningkatan pelayanan kepada masyarakat di semua sektor pembangunan. Salah satu bentuk pelayanan dasar yang menjadi tugas dan tanggung jawab Pemerintah daerah Kabupaten/Kota adalah penyediaan kebutuhan air minum dan sanitasi yang sangat berkaitan erat dengan kondisi kesehatan masyarakat. Perilaku hidup bersih dan sehat merupakan suatu hal yang sangat penting dan menjadi tantangan tersendiri dalam mewujudkan kesehatan masyarakat. Hal ini disebabkan karena disamping kesadaran masyarakat akan hidup sehat masih diragukan, sarana untuk berperilaku hidup bersih dan sehat di masyarakat pun dirasa masih sangat terbatas.

Melihat berbagai tantangan yang dihadapi untuk memberikan pelayanan air minum dan sanitasi yang memadai maka teretuslah program *third water supply and sanitation for low income community (WSLIC)* yang kemudian dikenal sebagai PAMSIMAS (Penyediaan Air Minum dan Sanitasi Berbasis Masyarakat) dalam rangka menciptakan masyarakat hidup bersih dan sehat melalui penyediaan pelayanan air bersih dan sanitasi.

Pelaksanaan program PAMSIMAS dilandasi dengan kebijakan Pemerintah yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2005-2025. RPJPN mengamanatkan pada akhir periode RPJM 2015-2019 layanan dasar air minum dan sanitasi dapat dinikmati oleh seluruh rakyat Indonesia.

Ada 5 (lima) komponen program dalam program PAMSIMAS yaitu; 1) Pemberdayaan masyarakat dan pengembangan kelembagaan daerah; 2) Peningkatan perilaku higienis dan pelayanan sanitasi; 3) Penyediaan sarana air minum dan sanitasi umum; 4) Insentif Desa/Kelurahan Dan Kabupaten/Kota; dan 5) Dukungan manajemen pelaksanaan program.

Program ini dilaksanakan di wilayah perdesaan dan pinggiran Kota. Program PAMSIMAS bertujuan untuk meningkatkan jumlah warga masyarakat yang kurang terlayani termasuk masyarakat berpendapatan rendah di wilayah perdesaan dan pinggiran agar dapat mengakses pelayanan air minum dan sanitasi yang berkelanjutan, meningkatkan penerapan nilai dan perilaku hidup bersih dan sehat dalam rangka pencapaian target sektor air minum dan sanitasi melalui pengarusutamaan dan perluasan pendekatan pembangunan berbasis masyarakat.

Program Pamsimas adalah salah satu bentuk aksi nyata dari pemerintah Indonesia baik pusat maupun daerah dalam upaya pembangunan desa dan peningkatan penyediaan air minum dan sanitasi berbasis masyarakat, dan meningkatkan kesehatan masyarakat dan lingkungan di desa, serta berupaya menurunkan angka penyakit diare dan penyakit lainnya yang ditularkan melalui air dan lingkungan yang tidak bersih.

Adapun ruang lingkup dari kegiatan program Pamsimas adalah :

1. Pemberdayaan Masyarakat dan Pengembangan Kelembagaan Lokal
2. Peningkatan Kesehatan dan Perilaku Higienis dan Pelayanan Sanitasi
3. Penyediaan Sarana Air Minum dan Sanitasi Umum
4. Insentif untuk Desa / Kelurahan dan Kabupaten / Kota; dan
5. Dukungan Pelaksanaan dan Manajemen proyek

Program Pamsimas adalah salah satu program Pemerintah Pusat dalam pembangunan yang masuk ke desa-desa untuk menyelesaikan segala permasalahan yang berhubungan dengan air dan lingkungan yang berbasis masyarakat. Program ini hadir tentu dengan tujuan awalnya adalah untuk membantu masyarakat di desa

dalam berbagai kebutuhan air untuk aktivitas kehidupan sehari-harinya serta kesehatan lingkungan tempat mereka tinggal. Program ini memang tidak hanya untuk desa tertinggal, tetapi untuk semua desa yang memang membutuhkan sarana air ataupun kekurangan akses air di desa mereka guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat di desa tersebut.

Program Pamsimas dilaksanakan di wilayah perdesaan dan pinggiran Kota, seperti pada Desa Beringin Jaya Kecamatan Baebunta Selatan. Namun pelaksanaan program Pamsimas ini memiliki beberapa masalah, mulai dari tidak berjalannya program PAMSIMAS di Desa Beringin Jaya Kecamatan Baebunta Selatan Kabupaten Luwu Utara padahal sudah ada bangunan disediakan, serta adanya kerusakan maupun ketidaklengkapan peralatan dalam bangunan Pamsimas tersebut, sehingga pelaksanaan program tersebut terkendala dan kurangnya keterlibatan langsung dari masyarakat di Desa Beringin Jaya serta kurangnya koordinasi pihak pengelola Pamsimas.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif yang bersifat deskriptif. Melalui pendekatan ini, penulis menjelaskan secara rinci dan mendalam terkait Implementasi Program Penyediaan Air Minum Dan Sanitasi Berbasis Masyarakat (Pamsimas) Di Desa Beringin Jaya Kecamatan Baebunta Selatan.

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah yang dikemukakan Miles dan Huberman (2014) yang dalam penelitiannya terdiri dari tiga alur kegiatan yang terjadi secara langsung bersamaan, yaitu Kondensasi Data, Display Data, dan Conclusion.

HASIL PENELITIAN & PEMBAHASAN

Program Pamsimas adalah salah satu program Pemerintah Pusat dalam pembangunan yang masuk ke desa-desa untuk menyelesaikan segala permasalahan yang berhubungan dengan air dan lingkungan yang berbasis masyarakat. Program ini hadir tentu dengan tujuan awalnya adalah untuk membantu masyarakat di desa dalam berbagai kebutuhan air untuk aktivitas kehidupan sehari-harinya serta kesehatan lingkungan tempat mereka tinggal. Program ini memang tidak hanya untuk desa tertinggal, tetapi untuk semua desa yang memang membutuhkan sarana air ataupun kekurangan akses air di desa mereka guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat di desa tersebut.

Pencapaian keberhasilan Pamsimas:

1. Adanya keberlanjutan pelayanan sarana air

minum dan sanitasi.

2. Adanya perubahan perilaku masyarakat menuju perilaku hidup sehat serta terjadi peningkatan pelayanan kesehatan dan sanitasi.
3. Adanya prioritas program kepada masyarakat yang miskin dan termajinalkan.

Adapun manfaat yang diharapkan dengan adanya program dengan meningkatnya jumlah masyarakat untuk mengakses air bersih atau air minum dan sanitasi yang layak serta mempraktekan perilaku hidup bersih dan sehat (*hygiene*), sebagai bagian usaha pencapaian target MDG's sektor air minum dan sanitasi melalui upaya pengarusutamaan (*mainstreaming*) dan perluasan (*scaling up*) program berbasis masyarakat secara nasional. Adapun secara rinci manfaat yang dihasilkan program Pamsimas adalah sebagai berikut:

1. Menjaga kesehatan manusia
2. Mencegah atau memberikan kompensasi kerugian atas kehilangan asset dan/atau mata pencaharian.
3. Mencegah kerusakan lingkungan hidup yang diakibatkan oleh pembangunan secara individu atau bersama-sama.
4. Mendorong tercapainya dampak positif bagi lingkungan hidup.
5. Mengindari atau meminimalkan dampak sosial, ekonomi, dan lingkungan hidup yang tidak diinginkan.
6. Perubahan perilaku masyarakat menuju perilaku hidup bersih dan sehat serta peningkatan pelayanan kesehatan.

Untuk seleksi menentukan desa/kelurahan yang dinilai layak menjadi lokasi sasaran program Pamsimas diantaranya sebagai berikut :

1. Indeks kemiskinan desa/kelurahan yang tinggi
2. Desa/kelurahan yang memiliki keterbatasan akses terhadap air bersih/air minum dan sanitasi berbasis masyarakat.
3. Desa/kelurahan dengan tingkat penyakit diare atau penyakit terkait dengan air yang tinggi.
4. Desa/kelurahan yang belum mendapatkan program sejenis di 2 tahun terakhir.

Selanjutnya peneliti akan memaparkan pembahasan hasil penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti dari hasil observasi,

wawancara, dokumentasi, serta studi kepustakaan mengenai Implementasi program penyediaan air minum dan sanitasi berbasis masyarakat (Pamsimas) di Desa Beringin Jaya Kecamatan Baebunta Selatan Kabupaten Luwu Utara, dengan beberapa indikator yang diambil menurut teori Implementasi Model Merilee S Grindle. Indikatornya menurut konteks dari isi kebijakan adalah sebagai berikut :

1. Kepentingan yang terpengaruhi oleh Kebijakan

Suatu kebijakan termasuk diantaranya adalah sebuah peraturan yang dibuat oleh pemerintah untuk menyelesaikan segala permasalahan-permasalahan di tengah masyarakat dengan melibatkan kepentingan-kepentingan dari pihak tertentu ataupun pihak terkait pada tahap implementasinya. Kepentingan-kepentingan yang terpengaruhi oleh kebijakan tentu saja adalah sasaran dari kebijakan tersebut, seperti masyarakat. Berikut ini merupakan penjelasan mengenai indikator kepentingan yang mempengaruhi dalam implementasinya.

Dalam sebuah kebijakan ataupun Program Pamsimas ini sasaran utamanya adalah masyarakat, yaitu bertujuan untuk meningkatkan jumlah warga masyarakat yang kurang terlayani termasuk masyarakat berpendapatan rendah di wilayah perdesaan yang dapat mengakses pelayanan air minum dan sanitasi yang berkelanjutan, meningkatkan penerapan nilai dan perilaku hidup bersih dan sehat. Untuk lebih jelasnya peneliti menanyakan kepada Pak Amran selaku Bendahara Program Pamsimas ini mengenai kepentingan kepentingan yang terpengaruhi oleh kebijakan atau program Pamsimas tersebut, berikut pemaparannya :

“Tujuan utama dari program Pamsimas ini adalah untuk memberikan bantuan kepada masyarakat mengenai air bersih yang mana kebanyakan masyarakat masih belum memiliki air bersih untuk di gunakan sehari-hari, karena seharusnya kategori yang dinyatakan bersih itu mesti betul-betul dalam mencapai 70 meter, sedangkan di masyarakat ini sendiri kedalaman sumur yang biasa di gunakan sehari-hari masih kategori dangkal. Kepentingan yang terpengaruhi oleh program Pamsimas ini yaitu kepada masyarakat yang kapasitas air bersihnya itu masih kurang”

Pak Arwin sebagai Kaur Pembangunan Desa Beringin Jaya Kecamatan Baebunta Selatan juga mengemukakan hal serupa seperti

yang disampaikan oleh Pak Amran, adalah sebagai berikut :

“kepentingan yang terpengaruhi dengan adanya pembangunan program Pamsimas ini adalah untuk masyarakat yang kekurangan air bersih,terlebih lagi disini adalah Desa yang rawan sekali terkena banjir. Jika banjir melanda sumur-sumur warga yang digunakan untuk kebutuhan sehari-hari biasanya airnya keruh. Jadi kepentingan yang terpengaruhi disini terdapat pada masyarakat”.

Berdasarkan uraian-uraian dari para informan diatas, dapat peneliti simpulkan bahwa memang masyarakat sebagai sasaran utama di dalam pembuatan suatu kebijakan oleh pemerintah, yaitu untuk mensejahterakan masyarakatnya tentu saja kepentingan-kepentingan yang terpengaruhi oleh kebijakan dari Program Pamsimas ini adalah masyarakat. Dimana masyarakat menjadi penerima dari program Pamsimas tersebut. Karena tujuan dari program Pamsimas ini adalah untuk meningkatkannya akses layanan air minum dan sanitasi bagi masyarakat, baik masyarakat dipedesaan yang memiliki kekurangan cakupan air bersih dan air minum serta masyarakat miskin khususnya yang berada di daerah tertinggal.

2. Jenis Manfaat yang di Hasilkan

Suatu kebijakan yang dibuat oleh pemerintah baik itu program, peraturan, atau perundang-undangan sebagai landasan hukumnya harus dapat memberikan hasil yang bermanfaat dan berdampak positif serta dapat merubah kearah yang lebih baik dari hasil pengimplementasiannya. Setiap kebijakan tentunya adalah suatu upaya ataupun usaha dari pemerintah untuk menjadikan sesuatu menjadi lebih baik lagi dan dapat menyelesaikan permasalahan di tengah masyarakat serta bermanfaat. Tipe manfaat yang dalam suatu program seperti dalam Program Penyediaan Air Minum dan Sanitasi Berbasis Masyarakat (Pamsimas) adalah bertujuan untuk meningkatkan jumlah warga masyarakat yang kurang terlayani termasuk masyarakat berpendapatan rendah di wilayah perdesaan yang dapat mengakses pelayanan air minum dan sanitasi yang berkelanjutan, meningkatkan penerapan nilai dan perilaku hidup bersih dan sehat.

Untuk dapat mengetahui apakah manfaat yang dihasilkan dalam Program Pamsimas ini, maka peneliti melakukan wawancara dengan para pelaksana program yang menangani

langsung dalam proses pengimplementasian Program Pamsimas ini. Adapun pemaparan menurut Pak Amistang sebagai Ketua KKM dalam program Pamsimas ini adalah sebagai berikut :

“kalau Manfaat-manfaat yang akan di hasilkan jika Pamsimas ini berjalan cukup banyak pastinya, mulai ketersediaannya air bersih untuk masyarakat, terlebih disini adalah Desa yang rawan sekali banjir. Jika terjadi banjir apalagi jika musim penghujan itu pasti hampir beberapa bulan banjir datang dan surut terus, terlebih penampungan air yang biasa digunakan masyarakat untuk kebutuhan sehari-hari biasa keruh dan berbau, jadi manfaat yang dihasilkan jika program Pamsimas ini berjalan pasti cukup banyak. Dan saya adalah salah satu yang ingin sekali menggunakan air bersih dari program Pamsimas ini”.

Hal serupa pun di sampaikan oleh Ibu Masniah sebagai Anggota BPD serta mewakili beberapa masyarakat desa Beringin Jaya mengenai Jenis Manfaat yang dihasilkan adalah sebagai berikut :

“Manfaat yang dirasakan itu belum ada karena program Pamsimas ini sendiri belum berjalan, andaikan sudah berjalan saya salah satu orang yang ingin menggunakan program Pamsimas ini. Karena air bersih itu penting untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Jadi harapannya semoga program ini segera dijalankan supaya masyarakat yang ingin menggunakan juga segera mendapatkan air bersih ini”.

Berdasarkan uraian ataupun hasil pemaparan para informan mengenai tipe yang dihasilkan oleh Program Pamsimas tentu manfaatnya sangat baik, sangat berguna dan membantu para masyarakat di dalam melakukan aktivitas keseharian mereka, Karena seperti yang kita tahu bahwa manusia pasti membutuhkan air dalam kehidupan sehari-hari kita, baik untuk minum, untuk mencuci, untuk mandi dan sebagainya. Maka dengan adanya Program Pamsimas ini, masyarakat berharap agar program ini segera dilaksanakan supaya masyarakat dapat merasakan secara nyata manfaat program air bersih ini untuk digunakan dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari.

Maka tipe manfaat yang diharapkan dengan adanya program Pamsimas ini adalah dengan meningkatnya jumlah masyarakat untuk mengakses air bersih atau air minum dan sanitasi yang layak serta mempraktekan perilaku

hidup bersih dan sehat (*hygiene*), sebagai bagian usaha pencapaian target MDG's sektor air minum dan sanitasi melalui upaya pengurusan utama (*mainstreaming*) dan perluasan (*scaling up*) program berbasis masyarakat secara nasional.

3. Derajat perubahan yang diinginkan

Dalam suatu kebijakan tidak dapat dipisahkan dari adanya suatu target yang hendak atau ingin dicapai. Derajat perubahan yang ingin dicapai dari Implementasi program penyediaan air minum dan sanitasi berbasis masyarakat (Pamsimas) di Desa Beringin Jaya ini untuk para penyelenggara atau pelaksana program adalah untuk memberikan pelayanan yang optimal untuk masyarakat agar dapat memenuhi kecukupan air minum dan air bersih serta sanitasi yang berbasis masyarakat. dalam pembuatan suatu kebijakan ataupun program tentu melihat suatu fenomena di tengah masyarakat yang cukup meresahkan, *urgent* yang tentunya sangat perlu untuk diselesaikan segera mungkin. Dari suatu fenomena atau situasi yang awal tentu diharapkan setelah adanya kebijakan atau program yang menangani dapat berubah menjadi situasi yang lebih baik lagi sesuai dengan tujuan yang awal dibuatnya kebijakan tersebut.

Adapun target atau derajat perubahan yang ingin dicapai yang dipaparkan oleh Saudara Amran selaku salah satu pengurus program Pamsimas ini adalah :

“Desa Beringin Jaya ini kan adalah salah satu desa penerima program bantuan Air bersih dari beberapa desa yang ada di Kabupaten Luwu Utara ini, seperti yang diketahui ini juga adalah salah satu desa yang rawan terkena bencana banjir. Jadi perubahan yang diharapkan masyarakat mampu menikmati dan menggunakan air bersih dalam kebutuhan keseharian mereka, serta diharapkan pula masyarakat dapat sadar mengenai pentingnya penggunaan air bersih dalam memenuhi kebutuhan harian mereka dan mau menggunakan program yang telah di program kan di Desa ini”.

Pernyataan serupa pun dipaparkan oleh Ibu suhaida sebagai salah satu masyarakat di Desa Beringin Jaya, pemaparannya sebagai berikut :

“mengenai perubahan dengan adanya program ini belum ada masyarakat merasakannya sama sekali, karena program ini sendiri tidak berjalan

sampai saat ini. Terlebih lagi jika kita ingin menggunakan program ini ada biaya yang perlu di keluarkan masyarakat, mungkin sebagian masyarakat ada yang ingin karena mereka mampu tapi sebagian banyak yang tidak ingin karena memikirkan biaya yang meski dikeluarkan, meskipun air bersih sangat penting untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari tapi masyarakat pasti juga memikirkan biaya pemasangan untuk menggunakan program ini”.

Dari pemaparan diatas, Maka peneliti dapat menarik kesimpulan bahwa derajat perubahan yang ingin dicapai atau capaian dari Program Pamsimas tersebut tentu saja adalah terpenuhinya kebutuhan masyarakat akan air bersih dan air minum serta terlaksananya sanitasi yang berbasis masyarakat.

4. Kedudukan Pembuat Kebijakan

Letak pengambilan keputusan tentunya sangat erat kaitannya dengan para *stakeholders* dimana setiap keputusan yang diambil dalam menjalankan suatu kebijakan satu program harus sesuai dengan peraturan dan ketentuan yang ada dan keputusan yang diambil tentu untuk kepentingan bersama. Pengambilan keputusan di dalam suatu kebijakan memegang peranan penting dalam menentukan keberhasilan suatu program dalam pengimplementasiannya, seperti yang kita tahu juga bahwa kebijakan menurut Thomas R.Dye dalam Buku Budi Winarno (2012:20) adalah apapun yang dipilih oleh pemerintah untuk melakukan atau tidak melakukan (*public policy is whatever governments choose to do or not to do*).

Dalam bagian ini peneliti akan menjelaskan letak pengambilan keputusan mengenai koordinasi dari instansi terkait serta menjelaskan letak pengambilan keputusan yang terkait dengan Implementasi Penyediaan Air Minum dan Sanitasi Berbasis Masyarakat (Pamsimas).

Adapun kedudukan pembuat kebijakan menurut bapak Amistang selaku ketua KKM yang bertanggung jawab mengenai program Pamsimas ini adalah :

“sebagai ketua KKM untuk program ini sendiri saya diberi tanggung jawab untuk mengawasi pelaksanaan dari program Pamsimas ini. Dan program ini kan dari dinas terkait yaitu Bappeda dan Dinas Kesehatan, dan saya sudah berkoordinasi dengan pengurus program Pamsimas ini mengenai bagaimana agar program ini segera dilaksanakan. Dan saya

sudah berkoordinasi dengan aparat desa mengenai dana yang diperlukan untuk pelaksanaan program Pamsimas ini dan bagaimana dengan masyarakat yang kurang mampu yang mesti mengeluarkan biaya untuk dapat menggunakan air bersih nantinya”.

Kemudian pemaparan mengenai letak pengambilan keputusan menurut pak Nurgianto selaku masyarakat di Desa Beringin jaya ini adalah :

“untuk letak pengambilan keputusan ini sendiri di ambil dengan musyawarah dengan masyarakat setempat dan beberapa aparat desa di kantor Desa Beringin Jaya sendiri dan pengurus-pengurus program Pamsimas ini. Dan itu dilakukan sekali saja saat program ini akan dibangun di Desa ini”.

Berdasarkan jawaban wawancara tersebut maka dapat dipahami bahwa koordinasi yang dilakukan dalam Program Pamsimas ini adalah adanya koordinasi dari Bappeda – Dinas Kesehatan – aparat pemerintah Desa Beringin Jaya dan kemudian di tanggung jawabkan ke pengurus Pamsimas yang telah di Pilih.

5. (Siapa) Pelaksana Program

Pelaksanaan program adalah suatu hal yang sangat penting dalam suatu Kebijakan, karena pelaksana program adalah penggerak ataupun alat untuk mencapai suatu keberhasilan yang telah ditetapkan pada awal pembuat kebijakan. Dapat dikatakan para pelaksana ini adalah penyedia dan yang pemberi pelayanan bagi masyarakat di dalam suatu program, selain itu pelaksana program juga sebagai tolak ukur untuk melihat sejauh mana suatu program diimplementasikannya. Untuk mengetahui pelaksanaan program dalam Pamsimas, peneliti melakukan pengamatan di lapangan, wawancara yang mendalam kepada para informan terkait.

Berikut ini merupakan pemaparan yang disampaikan oleh Pak Amistang selaku Ketua KKM di Desa Beringin Jaya, berikut pemaparannya :

“pelaksana dari program Pamsimas ini seperti yang telah saya bilang sebelumnya bahwa ini dari Bappeda dan Dinas Kesehatan yang kemudian di tanggung jawabkan ke pengurus KKM dan pengurus program Pamsimas. Pelaksanaan program ini mandek karena pengurus-pengurus yang bertanggung jawab pun sekarang hanya tinggal beberapa orang saja yang aktif, dan tentu saja peranan aktif pengurus

dan masyarakat itu sangat penting untuk mensukseskan Program Pamsimas ini”.

Pendapat serupa pun dikemukakan oleh saudara Amran selaku bendahara program Pamsimas ini adalah sebagai berikut :

“program Pamsimas ini dari Bappeda yang kemudian bekerja sama dengan Dinas kesehatan, kemudian ke desa dan pengurus program Pamsimas yang telah dipilih. Program ini sudah setahun lebih tidak berjalan, karena dari dana desa dan beberapa peralatan untuk digunakan dalam menjalankan program ini sendiri masih belum ada,terlebih masyarakat yang masih enggan menggunakan program ini karena mungkin mengira air yang digunakan sehari-hari sudah dalam kategori bersih padahal menurut dinas kesehatan itu tidak, terlebih biaya yang meski dikeluarkan untuk menggunakan program ini pun menjadi pertimbangan sebageian masyarakat”.

Maka dapat disimpulkan bahwa program Pamsimas ini dari pusat kemudian ke daerah yang kemudian terkoordinasi ke tingkat Desa dan kemudian di tanggung jawab kan ke pengurus program Pamsimas di Desa Beringin Jaya.

6. Sumber daya yang digunakan

Dalam pelaksanaan atau pengimplementasian suatu kebijakan perlu didukung dengan adanya sumber daya yang dapat memberikan pengaruh positif dan berguna untuk mensukseskan dalam pelaksanaan suatu kebijakan ataupun program tersebut. Sumber daya yang memadai tentunya sangat membantu di dalam pelaksanaan suatu kebijakan tersebut agar dapat berjalan dengan baik, maksimal, efektif dan efisien.

Pelaksanaan kebijakan akan berjalan dengan baik dan lancar apabila didalam pelaksanaannya dilakukan oleh Sumber Daya Manusia (SDM) yang mencukupi dan tentunya berkualitas. Dalam pencapaian tersebut tentu membutuhkan SDM yang sesuai dengan kemampuan, yang memiliki kecakapan dan kecukupan untuk menjalankan suatu kebijakan tersebut.

Pemaparan yang dilakukan oleh pak Amran sebagai bendahara dari program Pamsimas di Desa Beringin Jaya :

“Sumber daya yang di gunakan dalam pelaksanaan Program Pamsimas ini adalah sumber daya Manusia yang dikerahkan dari APBN,APBD dan Swadaya Masyarakat sebagai

tenaga yang digunakan dalam pelaksanaan program Pamsimas ini “.

Hal serupa di sampaikan oleh pak Amistang selaku ketua KKM yaitu sebagai berikut :

“sumber daya manusia yang digunakan ini dari masyarakat,ada pula dari beberapa pengurus yang dikerahkan dari daerah hingga ke tingkat desa. Baik dari pegawai dari instansi terkait, masyarakat di Desa Beringin Jaya ini sendiri, kepala desa dan beserta stafnya, kemudian dari lahan yang digunakan untuk membangun program penampungan air bersih ini. Namun karena semuanya agak jauh jadi yang aktif itu hanya tinggal beberapa pengurus saja, sumber daya manusia ini sendiri pun dari masyarakat secara sukarela membantu dan mau melaksanakan program ini. Tapi karena program ini mandek jadi pengurus nya juga pada tidak aktif”.

Maka dapat peneliti simpulkan bahwa Sumber daya Manusia yang digunakan dalam membangun dan melaksanakan program ini terdiri dari Daerah, Instansi terkait, kepala Desa beserta stafnya dan masyarakat di Desa tersebut. Dan dapat disimpulkan pula bahwa semua pelaksana dalam program ini memiliki perannya masing-masing di dalam melaksanakan dan mengimplementasikan program Pamsimas ini.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan temuan-temuan di lapangan mengenai Implementasi Program Penyediaan Air Minum dan Sanitasi Berbasis Masyarakat (Pamsimas) di Desa Beringin Jaya Kecamatan Baebunta Selatan Kabupaten Luwu Utara, peneliti dapat menyimpulkan bahwa pada Implementasi yang dilaksanakan belum dapat dikatakan berhasil dan berjalan optimal. Berbagai masalah di lapangan ditemukan bahwa dalam implementasinya terdapat hal-hal yang menghambat pelaksanaan dari program Pamsimas ini, sehingga sampai saat ini program Pamsimas ini belum berjalan. Masalah yang ditemukan yaitu dari kurangnya peran serta partisipasi masyarakat didalam pelaksanaan program Pamsimas ini, kemudian tidak aktifnya pengurus yang diberi tanggung jawab dalam mengurus program Pamsimas di Desa Beringin Jaya ini dan beberapa kendala lainnya seperti biaya yang mesti dikeluarkan masyarakat untuk dapat bisa menggunakan program air bersih ini. Pada pelaksanaan Pamsimas di lapangan juga

adanya kurang berkoordinasi antara sesama pengurus Program Pamsimas dan dinas atau instansi terkait.

Maka dapat dikatakan faktor-faktor yang menjadi penghambat dari kesuksesan implementasi pada Program Pamsimas ini adalah yang pertama kurang koordinasi antara para pengurus Program Pamsimas, serta kurangnya peran serta dari masyarakat dalam mensukseskan program Pamsimas ini dikarenakan persoalan anggaran biaya yang mesti dikeluarkan setiap masyarakat yang ingin menggunakan program ini, sehingga berpengaruh terhadap tujuan diadakannya program ini agar masyarakat dapat terpenuhi kebutuhan air bersihnya dalam penggunaan kebutuhan sehari-harinya dan dapat dan mau hidup bersih dan sehat.

Kemudian kurangnya kesadaran masyarakat mengenai pentingnya air bersih dalam penggunaan kebutuhan sehari-hari, dan kurangnya partisipasi masyarakat dalam pembangunan penampungan air bersih itu sehingga masyarakat di Desa tersebut pun merasa masa bodoh dengan bangunan penampungan air bersih tersebut. Sehingga tempat penampungannya pun tidak terawat yang menyebabkan tidak optimalnya pengimplementasian program Pamsimas ini.

Saran

Berdasarkan kesimpulan diatas, maka agar implementasi pada program penyediaan air minum dan sanitasi berbasis masyarakat (Pamsimas) di Desa Beringin Jaya dapat berjalan dengan baik dan sesuai, maka kiranya peneliti menyampaikan beberapa saran terkait hal tersebut, diantaranya :

1. Diperlukannya koordinasi antar dinas terkait, instansi, kepala desa beserta stafnya, serta para pengurus dari program Pamsimas tersebut mengenai kinerja dan tanggung jawab masing-masing dalam menjalankan program Pamsimas di Desa Beringin jaya.
2. Perlu adanya sosialisasi kepada masyarakat mengenai hidup sehat dan pentingnya penggunaan air bersih untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari.
3. Kepada masyarakat diharapkan dapat ikut serta aktif dalam mensukseskan pelaksanaan program air bersih ini, dan nantinya dapat menjaga dan merawat fasilitas dengan baik yang telah di sediakan oleh pemerintah setempat.

REFERENSI

- Anderson, James. 2010. *Public Policy Making. Holt, Rinehart and Winston* : Michigan University
- Dye, Thomas R. 2011. *Understanding Public Policy*. New Jersey: Prentice Hall
- Grindle, Merilee S. 1980. *Politics and Policy Implementation in The Third World*, Princenton University Press, New Jersey.
- Miles, M.B, Huberman,A.M, dan Saldana,J. 2014. *Qualitative Data Analysis, A Methods Sourcebook*, Edition 3. USA: Sage Publications. Terjemahan Tjetjep Rohindi Rohidi, UI-Press
- Nugroho, Riant. 2011. *Public Policy: Dinamika Kebijakan, Analisis Kebijakan, Manajemen Kebijakan*. Jakarta: PT Elex Media Komputindo.